

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : Dinas Perkebunan
TAHUN ANGGARAN : 2026

PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										
KODE PROGRAM	3.27.03										
KEGIATAN	Penataan Prasarana Pertanian										
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani										
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). a. Pembangunan prasarana pertanian, khususnya jalan usaha tani, memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan usaha tani dan perkebunan, mulai dari akses menuju lahan, distribusi sarana produksi, hingga pengangkutan hasil panen. Di Kalimantan Timur, kegiatan usaha tani tidak hanya melibatkan laki-laki tetapi juga perempuan yang turut berperan dalam berbagai tahapan kegiatan pertanian dan perkebunan seperti pemeliharaan tanaman, panen, serta pengolahan hasil. Berdasarkan data kelembagaan kelompok tani, jumlah pelaku usaha tani masih didominasi oleh laki-laki. Sebagai contoh, dari sekitar 1.584 anggota kelompok tani, sekitar 73,07% merupakan laki-laki dan 26,96% perempuan. Selain itu, kepemimpinan kelompok tani sebagian besar juga masih didominasi oleh laki-laki, dengan sekitar 93,83% ketua kelompok tani laki-laki dan 6,17% perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan prasarana pertanian, termasuk pengelolaan jalan usaha tani, masih relatif terbatas. Di sisi lain, perempuan juga memiliki peran penting dalam kegiatan usaha tani, terutama dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, serta pengolahan hasil. Akses jalan usaha tani yang baik tidak hanya mendukung mobilitas laki-laki sebagai pengelola lahan, tetapi juga mempermudah perempuan dalam melakukan kegiatan usaha tani serta mendukung distribusi hasil produksi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perlu memperhatikan data pilah berdasarkan jenis kelamin, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian dapat lebih responsif gender. Dengan demikian, pembangunan jalan usaha tani diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi laki-laki dan perempuan serta mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani/pekebun. 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan : 1) Dalam pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani masih terdapat beberapa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, antara lain: Akses : Perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap informasi terkait perencanaan pembangunan dan pengelolaan jalan usaha tani. Partisipasi : Keterlibatan perempuan dalam forum koordinasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan terkait pembangunan jalan usaha tani masih relatif rendah dibandingkan laki-laki. Kontrol : Pengambilan keputusan mengenai penentuan lokasi, prioritas pembangunan, dan pengelolaan jalan usaha tani umumnya lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Manfaat : Meskipun perempuan juga terlibat dalam kegiatan usaha tani dan perkebunan, manfaat dari pembangunan jalan usaha tani belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh perempuan. b. Penyebab Internal : 1) Penyebab kesenjangan yang berasal dari kondisi dalam kelompok tani atau masyarakat, antara lain: 1. Kepengurusan kelompok tani sebagian besar masih didominasi oleh laki-laki. 2. Kepemilikan atau penguasaan lahan usaha tani lebih banyak tercatat atas nama laki-laki. 3. Perempuan memiliki keterbatasan waktu untuk terlibat dalam kegiatan kelompok tani karena tanggung jawab domestik. 4. Tingkat partisipasi perempuan dalam forum musyawarah atau perencanaan pembangunan masih rendah. c. Penyebab Eksternal : 1) Penyebab kesenjangan yang berasal dari kebijakan, sistem program, atau lingkungan di luar kelompok tani, antara lain: 1. Sosialisasi program pembangunan jalan usaha tani lebih banyak dilakukan melalui pengurus kelompok tani yang mayoritas laki-laki. 2. Mekanisme koordinasi dan perencanaan pembangunan prasarana pertanian belum sepenuhnya memperhatikan keterlibatan perempuan. 3. Data pelaku usaha tani berdasarkan jenis kelamin belum sepenuhnya tersedia sebagai dasar perencanaan program. 4. Norma sosial dan budaya yang masih menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam kegiatan usaha tani.										
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Tujuan : Meningkatkan produksi komoditas tanaman perkebunan a. Dalam pelaksanaan Monitoring pada kelompok tani penerima bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus melakukan Penataan Prasarana Pertanian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur perlu memperhatikan faktor kesenjangan baik internal maupun eksternal agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara lebih inklusif dan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam Meningkatkan produksi komoditas tanaman perkebunan 2. Indikator dan Target Kinerja a. Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan										
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 48.432.000										
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="375 1496 478 1796" rowspan="4">Kegiatan 1</td><td colspan="2" data-bbox="478 1496 1508 1552">Monitoring pada kelompok tani penerima bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus melakukan Penataan Prasarana Pertanian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 1552 619 1581">Masukan</td><td data-bbox="619 1552 1508 1581">Rp. 48.432.000</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 1581 619 1693">Keluaran</td><td data-bbox="619 1581 1508 1693">1. Tersedianya data dan informasi kondisi pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan kepada kelompok tani. 2. Teridentifikasinya kondisi dan kebutuhan penataan prasarana pertanian/perkebunan di wilayah kabupaten/kota. 3. Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan serta kondisi prasarana pertanian. 4. Tersedianya rekomendasi penataan dan pengembangan prasarana pertanian/perkebunan untuk mendukung kegiatan usaha tani.</td></tr> <tr> <td data-bbox="478 1693 619 1796">Hasil</td><td data-bbox="619 1693 1508 1796">1. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan bantuan sarana produksi oleh kelompok tani. 2. Meningkatnya keterlibatan dan pengelolaan prasarana pertanian/perkebunan di wilayah kabupaten/kota. 3. Meningkatnya akses dan dukungan prasarana bagi kegiatan usaha tani dan perkebunan. 4. Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan melalui dukungan sarana dan prasarana yang lebih baik. 5. Tersedianya bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan program bantuan dan pengembangan prasarana pertanian/perkebunan.</td></tr> </table>		Kegiatan 1	Monitoring pada kelompok tani penerima bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus melakukan Penataan Prasarana Pertanian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur		Masukan	Rp. 48.432.000	Keluaran	1. Tersedianya data dan informasi kondisi pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan kepada kelompok tani. 2. Teridentifikasinya kondisi dan kebutuhan penataan prasarana pertanian/perkebunan di wilayah kabupaten/kota. 3. Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan serta kondisi prasarana pertanian. 4. Tersedianya rekomendasi penataan dan pengembangan prasarana pertanian/perkebunan untuk mendukung kegiatan usaha tani.	Hasil	1. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan bantuan sarana produksi oleh kelompok tani. 2. Meningkatnya keterlibatan dan pengelolaan prasarana pertanian/perkebunan di wilayah kabupaten/kota. 3. Meningkatnya akses dan dukungan prasarana bagi kegiatan usaha tani dan perkebunan. 4. Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan melalui dukungan sarana dan prasarana yang lebih baik. 5. Tersedianya bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan program bantuan dan pengembangan prasarana pertanian/perkebunan.
Kegiatan 1	Monitoring pada kelompok tani penerima bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus melakukan Penataan Prasarana Pertanian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur										
	Masukan	Rp. 48.432.000									
	Keluaran	1. Tersedianya data dan informasi kondisi pemanfaatan bantuan yang telah disalurkan kepada kelompok tani. 2. Teridentifikasinya kondisi dan kebutuhan penataan prasarana pertanian/perkebunan di wilayah kabupaten/kota. 3. Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan serta kondisi prasarana pertanian. 4. Tersedianya rekomendasi penataan dan pengembangan prasarana pertanian/perkebunan untuk mendukung kegiatan usaha tani.									
	Hasil	1. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan bantuan sarana produksi oleh kelompok tani. 2. Meningkatnya keterlibatan dan pengelolaan prasarana pertanian/perkebunan di wilayah kabupaten/kota. 3. Meningkatnya akses dan dukungan prasarana bagi kegiatan usaha tani dan perkebunan. 4. Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan melalui dukungan sarana dan prasarana yang lebih baik. 5. Tersedianya bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan program bantuan dan pengembangan prasarana pertanian/perkebunan.									

Samarinda, 30 Maret 2026

Pt. Kepala Dinas

Ahmad Muzakir, S.T.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197510012001121003